

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan di Indonesia khususnya yang sudah *go public* diwajibkan menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Dalam laporan keuangan terdapat informasi kinerja perusahaan yang dilakukan sebagai pembuat keputusan ekonomi pada periode selanjutnya.

Laporan keuangan perusahaan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dalam menentukan pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan, pihak internal adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, seperti manajer. Sedangkan, pihak eksternal meliputi pengguna yang berasal dari luar operasional perusahaan seperti pelanggan, investor, supplier, maupun pemerintah. Dalam tujuannya laporan keuangan sebagai media komunikasi antara manajemen dengan pihak luar manajemen maka laporan keuangan yang disajikan harus akurat, relevan dan tepat waktu agar informasi yang disampaikan bermanfaat bagi para penggunanya. Untuk membuktikan bahwa informasi yang disajikan akurat maka laporan keuangan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor independen agar memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan bebas dari salah saji material dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Pemeriksaan

yang dilakukan oleh auditor independen ini dapat menghambat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta bisa menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Kendala dalam menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang relevan yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dipublikasikan sebagai informasi bagi para investor. Apabila sebagai fungsi evaluasi dan *pricing*, mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham.

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir.

Fenomena yang terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan, siaran pers yang dilakukan oleh BEI dalam kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 2018, Bursa Efek Indonesia telah menjatuhkan sanksi terhadap 15 emiten, bahkan ada pula beberapa emiten yang mendapatkan denda sebesar Rp 50 juta hingga Rp 150 juta. Rina Hadriyani selaku PH kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI menyebutkan, terdapat 677 efek dan perusahaan tercatat berkewajiban menyampaikan laporan tengah tahun 2018. Dengan rincian, 612 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan I 2018, tujuh perusahaan tercatat berbeda periode pelaporan dan 44 efek dan perusahaan tidak wajib

menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 Per 30 Juni 2018 terdapat 15 Emiten belum menyampaikan laporan keuangan.

PT Buana Lintas Lautan Tbk (Bull) merupakan salah satu perusahaan yang dikenakan denda Rp 50 juta dan peringatan tertulis I dan II karena penyampaian laporan auditan semester I 2018 telah melewati batas waktu yang ditentukan. Sementara 10 emiten mendapat peringatan tertulis I karena sampai 1 Oktober 2018 belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 30 Juni 2018. Rinciannya perusahaan yaitu: PT Energi Mega Persada Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Pelayaran Tamarin Samudera Tbk, PT Visi Media Asia Tbk, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Tirta Austenite Tbk, Pt Hanson Internasional Tbk, dan PT Wahana Pronatural Tbk. (Jakarta, Indopremier.com)

Audit report lag adalah jumlah hari dari akhir tutup buku sampai dengan laporan dikeluarkan dalam auditing. Semakin lama waktu penyelesaian *audit report lag* dapat memberi pengaruh terhadap ketepatan waktu informasi tersebut untuk dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi pasar terhadap keterlambatan informasi yang dipublikasikan.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan kemungkinan dapat menimbulkan asimetris informasi suatu kondisi dimana pihak manajer (*agen*) memiliki informasi lebih banyak dari pemegang saham (*principal*) serta dimanfaatkan untuk kepentingan manajer itu sendiri. Permasalahan antara pihak *agen* dan *principal* dapat diminimalisir dengan adanya *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dapat dikatakan sebagai sistem pengendalian serta

pengelolaan perusahaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya. *Corporate governane* diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap auditor agar dapat mengurangi adanya audit report lag dan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan.

Elemen *corporate governane* dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, komisaris independen.

Ukuran komite audit termasuk dalam komponen *corporate governane* yang memiliki peran penting dalam pelaporan keuangan, dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan (Hahim & Rahman, 2011). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menegaskan keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, dan mengoptimalkan mekanisme *check and balance*, yang akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada pemegang saham dan *stakeholder*.

Sikap mental independen harus dimiliki para anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit yang memiliki independensi akan memiliki sikap mental yang tidak mudah untuk dipengaruhi, dikendalikan pihak lain dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri anggota komite audit dalam mengawasi proses pelaporan laporan keuangan.

Rapat komite audit adalah jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit selama satu tahun. Semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka

kualitas pelaporan yang dihasilkan baik sehingga hal ini dapat mengurangi adanya *audit report lag*.

Ukuran dewan komisaris memiliki tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan benar-benar menjalankan *corporate governance*. Dalam proses pengambilan keputusan dewan komisaris tidak boleh ikut serta (KNKG, 2006). Dalam sebuah perusahaan dikatakan bahwa komisaris terdiri dari komisaris independen dan terafiliasi.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya, bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (Amri, 2011). Pengawasan yang dilakukan dengan adanya komisaris independen membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan manajemen dapat mengakibatkan waktu penyelesaian audit berkurang.

Berdasarkan penelitian terdahulu memberikan hasil yang belum konsisten terkait hubungan antara ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan Handoyo & Hasanah (2017) memberikan hasil bahwa independensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Faishal & Basuki

(2015) memberikan hasil bahwa independensi berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*.

Gunarsa & Putri (2017), Handoyo & Hasanah (2017) memberikan hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Raharja (2013) memberikan hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*.

Terdapat juga penelitian tentang rapat komite audit yang dilakukan oleh Wardhani & Raharja (2013) bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian tentang ukuran dewan komisaris yang dilakukan oleh Wardhani & Raharja (2013) memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan yang dilakukan oleh Handoyo & Hasanah (2017) memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisari berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Dan hasil untuk penelitian terakhir adalah komisaris independen yang dilakukan oleh Handoyo & Hasanah (2017), Isnania, Suarmanto & Maemunah (2017) memberikan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan yang dilakukan oleh Ovami & Lubis (2018) memberikan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Raharja (2013) memberikan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian R Wedi Rusmawan Kusumah & Daniel T.H Manurung (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian R Wedi Rusmawan Kusumah & Daniel T.H Manurung (2017) adalah pada sampel perusahaan yang akan diteliti yaitu menggunakan Laporan Keuangan Perusahaan yang terdaftar di LQ-45 dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

Independensi komite audit diperkirakan dapat mengurangi audit report lag, karena jika semakin independen komite audit dalam perusahaan baik mengakibatkan kecenderungan auditor dalam melakukan *audit report lag* akan berkurang. Serta rapat komite audit juga diperkirakan dapat mengurangi *audit report lag*, ini dikarenakan semakin sering dilakukan pertemuan membuat pembaharuan informasi dan isu-isu akuntansi dapat ditemukan solusi. Komite audit dengan frekuensi pertemuan yang besar lebih memungkinkan menghasilkan laporan audit tepat waktu sehingga audit report lag dapat berkurang. Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 di Indonesia. Dimana saham –saham perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 merupakan saham yang aktif dan unggulan (frekuensi, volume dan nilai kapasitasnya tinggi) dan bagi perusahaan merupakan suatu kehormatan karena pasar modal terutama investor telah mengakui dan percaya tingkat likuiditas dan kapasitas pasar dari perusahaan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai **IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT LAG.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena jumlah perusahaan di Indonesia yang setiap tahunnya selalu bertambah masih ada perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan kepada OJK walaupun otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai batas akhir perusahaan menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK yaitu 120 hari setelah akhir tutup buku. Masih ditemukan perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada OJK serta adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, ukuran komite audit, komisaris independen. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana mengatasi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang pada penelitian ini menggunakan peran *Good Corporate Governance* dalam mengurangi *audit report lag*?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap *audit report lag*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh rapat komite audit terhadap *audit report lag*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit report lag*.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *audit report lag*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi keuangan.

2. Aspek Praktis

a. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan terhadap perusahaan dalam mengambil keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja.

b. Investor dan kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, dan meningkatkan kesadaran investor akan perusahaan yang melakukan *audit report lag* hanya akan berdampak negative bagi perusahaan.